

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
SEKRETARIAT DPRD KAB. HALMAHERA UTARA
Jl. Kawasan Pemerintahan No.1B
Tobelo



RENCANA KERJA (RENJA)

2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025 dapat terlaksana dengan baik dan lancar.

RENJA ini disusun sebagai bentuk implementasi dari perintah ketentuan Perundang-undangan dan merupakan pedoman dan acuan bagi Sekretariat DPRD kabupaten Halmahera Utara dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal. RENJA Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Utara ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pencapaian tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pada tahun 2025 dengan mengukur pencapaian indikator kinerja yang telah dirumuskan dan ditetapkan. Penyusunan RENJA ini telah memperhatikan kesesuaian dan keselarasan program dan kegiatan pada RENSTRA Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2021- 2026 dan RKPD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2025 maupun RPJMD Kabupaten halmahera Utara Tahun 2021- 2026 sehingga besar harapan kami target pencapaian misi Dan Program sebagai Tolak Ukur Pertanggung Jawaban Sekretariat DPRD Pada Akhir Tahun Anggaran.

Semoga RENJA ini dapat dipergunakan sebagai pedoman kerja dan memberikan manfaat dan peningkatan kualitas kinerja bagi Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Utara .

Tobelo, 07 Maret 2024



EKA PRATIKA, S.STP

NIP. 198301052001121003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Landasan Hukum..... 3

1.3 Maksud Dan Tujuan 5

1.4 Sistematika Penulisan..... 6

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN HALMAHERA UTARATAHUN LALU 7

2.1 Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun Lalu Dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD..... 7

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Sekretariat DPRD22

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....25

2.5 Penelaahan Urusan Program Dan Kegiatan Masyarakat.....32

BAB III TUJUAN , SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN33

3.1 Tujuan Dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD34

3.2 Program Dan Kegiatan.....35

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN HALMAHERA UTARA41

BAB V PENUTUP50

DAFTAR TABEL

Tabel 2.9 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Sekretariat DPRD dan Pencapaian RENSTRA Sekretariat DPRD Sampai Dengan Tahun 2024 17

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD..... 21

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal RK PD Tahun 2025..... 26

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Sekretariat DPRD..... 34

Table 4.1 Rumusan Rencana Program Dan Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2025 Dan Perkiraan Maju Tahun 2026..... 24

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana kerja (RENJA) Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan yang disusun sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan program, kegiatan, dan pendanaan indikatif yang dirancang dalam kurun waktu 1 tahun. RENJA Perangkat Daerah ini disusun berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Proses penyusunan RENJA Perangkat Daerah harus memperhatikan tahapan penyusunannya yang dimulai dari persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Penyusunan rancangan awal RENJA Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah, hasil evaluasi RENJA tahun lalu, dan hasil evaluasi RENJA tahun berjalan. RENJA berpedoman pada RENSTRA bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal RENJA Perangkat Daerah dengan RENSTRA Perangkat Daerah. RENJA ini juga berpedoman pada hasil evaluasi RENJA tahun lalu dan evaluasi RENJA tahun berjalan yang bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam RENJA Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran RENSTRA Perangkat Daerah.

Selanjutnya, RENJA Perangkat Daerah yang mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok

sasaran. Jadi, penyusunan RENJA Perangkat Daerah harus diselaraskan dengan RENSTRA Perangkat Daerah maupun RKPD.

Sekretariat DPRD yang merupakan salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara memiliki dokumen perencanaan baik RENSTRA maupun RENJA untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Utara sesuai RPJMD Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016- 2021. Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2021.

Sekretariat DPRD berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Sususnan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara . Tugas Dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara, dimana Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengankebutuhan

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD secara optimal, baik fungsi pembentukan Perda, fungsi penganggaran, dan fungsi pengawasan, maka perlu disusun RENJA Sekretariat DPRD sebagai acuan pelaksanaan program, kegiatan, dan pendanaan dalam kurun waktu 1 tahun. Program dan kegiatan tersebut perlu diperhatikan kesesuaian dan keselarasannya dengan dokumen RENSTRA dan RKPD yang ditindaklanjuti dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang menjadi satu kesatuan dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Utara Adalah Sebagai Berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara,Kabupaten Kepulauan Sula Kabupaten Halmahera Timur Dan Kota Tidore Kepulauan Di propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4286);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang hasil verifikasi, Validasi dan inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2021;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Nomor .. Tahun ... tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Berita Daerah Kabupaten Halmahera utara tahun Nomor..).

Maksud Dan Tujuan

Maksud :

Maksud penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD adalah Untuk Mengoptimalkan Peran Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Utara Dalam Melaksanakan Tugas Dan fungsinya Untuk memfasiliatsi Kegiatan DPRD sehingga Dapat semakin Mengembangkan Kepercayaan masyarakat Kepada Pemerintah Dalam Rangka Mewujudkan Good And clean Governance .Disamping itu Renja Ini juga dimaksudkan sebagai kerangka bagi arah Pembangunan Untuk 1 Tahun kedepan dalam Mencapai Visi- Misi Dan program serta Tolak Ukur Pertanggungjawaban Sekretariat DPRD pada Akhir Tahun Anggaran .

Tujuan :

Tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD adalah:

1. Sebagai bahan evaluasi pencapaian indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) tahun lalu dan tahun berjalan.
2. Tersusunnya Instrumen Rencana Kerja yang Merupakan Dokumen untuk meningkatkan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Utara
3. Tersusunnya kebijakan yang diperlukan sesuai dengan skala prioritas dalam melaksanakan pembangunan
4. Tersusunnya Program-program pembangunan pada secretariat DPRD kabupaten Halmahera Utara

5. Mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Bupati Halmahera Utara yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2016-2021
6. Tersusunnya rencana Kerja yang Merupakan penjabaran dari rencana strategis sesuai dengan bidang kewenangan Sekretariat DPRD kabupaten Halmahera Utara .
7. Tersusunnya Kegiatan-kegiatan dan alokasi pembiayaan dalam kurun waktu satu tahun ke depan .

Berdasarkan Tujuan –tujuan tersebut ,maka Rencana kerja ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan pegangan bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Utara Dalam Menyelenggarakan tugas –tugas pemerintah dan Pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPRD.

1.3 Sistematika Penulisan

Untuk Mengetahui Materi secara Keseluruhan dari Dokumen Rencana Kerja Sekretariat

DPRD Kabupaten Halmahera Utara Perlu disampaikan Sistematika Penyusunan renja ini

.yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 2.1 Landasan Hukum
- 2.2 Maksud Dan Tujuan
- 2.3 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun lalu dan Capaian Renstra Sekretariat DPRD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SekretariatDPRD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SekretariatDPRD
- 2.4 Review terhadap Rancangan AwalRKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program Dan KegiatanMasyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD

- 3.1 Telaahan Terhadap KebijakanNasional
- 3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja SekretariatDPRD
- 3.3 Program danKegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI RENCANA KERJA SEKRETARIAT
DPRD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun lalu Dan
Capaian Renstra Sekretariat DPRD

Evaluasi pelaksanaan Rencana kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Tahun lalu dilakukan sebagai tolak ukur keberhasilan atas pencapaian target yang ditetapkan. Evaluasi ini penting dilaksanakan untuk mengukur kesesuaian dan keselarasan antara perencanaan program dan kegiatan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan tersebut.

Berdasarkan hasil evaluasi RENJA Sekretariat DPRD Tahun lalu , pelaksanaan program dan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1.1 Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan

A. Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah kabupaten /kota

1. Penyediaan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Reslisasi kenerja Kegiatan ini dilakukan untuk terlaksananya sub kegiatan jasa surat menyurat, penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan Listrik, penyediaan jasa pelayanan umum kantor, penyusunan laporan capaian kinerja dan IKhtisar realisasi kinerja Sekretariat DPRD sampai pada akhir tahun 2024 pada target kinerja 100%, hasil capaian realisasi 61,73%

2. Pemeliharaan Barang Milik Daerah dan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memenuhi sub kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan atau kendaraan dinas jabatan, pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya dan pemeliharaan/rehabilitasi Gedung lainnya. Sampai dengan akhir tahun 2024 dari target kinerja kegiatan 100%, hasil capaian realisasinya 38,98 %.

3. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD

Kegiatan ini dilaksanakan untuk sub kegiatan penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD dan penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD. Sampai

dengan akhir tahun 024 dari target kinerja kegiatan 100%, hasil capaian realisasinya 97,04 %.

4. Layanan Adminisrasi DPRD

Kegiatan ini dilakukan untuk sub kegiatan fasilitasi rapat dan koordinasi DPRD dan penyediaan kebutuhan rumah tangga DPRD. Sampai dengan akhir tahun 2024 dari target kinerja kagiatan 100%, hasil capaian realisasinya 62,34 %

5. Fasilitasi Tugas DPRD

Kegiatan ini dilakukan untuk sub kegiatan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas DPRD. Sampai dengan akhir tahun 2024 dari target kinerja kegiatan 100%, hasil capaian realisasi 70,10 %

2.1.2 Realisasi program/kegiatan yang Tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

B. Program Penunjang urusan Pemerintahan Kabupaten /kota

1. Perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

Kegiatan ini dilaksanakan untuk sub kegiatan penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah, koordinasi dan penyusunan RKA-SKPD, koordinasi dan penyusunan perubahan RKA-SKPD, koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD, koordinasi dan penyusunan perubahan DPA-SKPD, koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikshtisar realisasi SKPD dan evaluasi kinerja perangkat daerah sampai dengan akhir tahun 2024 Dari target kinerja 100% hasil capaian kinerja 91,84%

2. Penyediaan Kebutuhan Rumah tangga DPRD Kegiatan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tanggaan pimpinan DPRD sampai dengan akhir tahun 2023 dari target kinerja 100% hasil capaian kinerja 79,28 %

C. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

1. Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengadakan pakaian dinas dan perlengkapan Anggota DPRD Sampai dengan akhir tahun 2023 dari target kinerjakegiatan 100% , hasil capaian realisasi 0 %

2. Penyusunan Dan pembahasan program Pembentukan peraturan DaerahKegiatan ini dilaksanakan untuk Pembahasan dan Konsultasirancangan peraturan daerah oleh DPRD .sampai dengan akhir Tahun 2023 dari target kinerja 100% ,hasil capaian kinerja 33,33%.

2.1.3 Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaryangdirencanakanProgram dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Utara pada tahun 2023 tidak ada yang melebihi Target baik indikator kinerja maupun realisasi keuangan Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi Targetkinerjaprogram/kegiata

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya target kinerjaprogram/kegiatan Secara umum yang menjadi faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program dan kegiatan, diantaranya:

- a. Terdapat efisiensi belanja pada beberapa program dankegiatan.
- b. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan

Secara umum yang menjadi faktor penyebab terpenuhinya target kinerja program/kegiatan, diantaranya:

- a. Program dan kegiatan dilaksanakan dengan baik mulai dari perencanaan sampai dengan realisasi keuangan.
- b. Ketepatan menentukan indikator kinerja pada program dan kegiatan.

- c. Kerjasama yang baik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab dari semua unit di Sekretariat DPRD.

- i. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Terhadap program dan kegiatan pada RENJA Sekretariat DPRD yang tidak memenuhi target capaian indikator kinerja, tentu saja memiliki implikasi terhadap pencapaian tujuan, sasaran, dan target indikator kinerja pada RENSTRA Sekretariat DPRD. Untuk itu, perlu mendapat perhatian secara seksama antar aparatur Sekretariat DPRD untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas kerja dalam memberikan pelayanan dan dukungan administrasi bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota DPRD sehingga target indikator kinerja dapat dicapai sesuai perencanaan yang diharapkan.

- ii. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Secara umum kebijakan/tindakan yang perlu dilakukan sebagai tindak lanjutnya adalah:

1. Mendorong peningkatan kualitas kinerja Anggota DPRD dengan memberikan pelayanan dan dukungan administrasi secara optimal dan akuntabel.
2. Memperbaiki atau menyesuaikan tolak ukur indikator kinerja untuk mendapatkan keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang terukur dan lebih baik.
3. Mengalokasikan anggaran sesuai dengan kebutuhan serta efisiensi alokasi belanja.

dapun Rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat daerah sampai dengan tahun berjalan pada secretariat DPRD dapat dilihat pada table T-C 2.9 berikut ini:

Tabel T-C 29

KODE REKENING					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (RENSTRA Perangkat Daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023	Target Dan Realisasi Kinerja Program Dan Kegiatan Tahun Lalu Tahun 2021			Target Program/ Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
									Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program & Kegiatan s/d Tahun Berjalan Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8 (7/6)	9	10 (5+7+9)	11=(10/4)
4					Urusan penunjang Urusan Pemerintahan									
	2				Sekretariat DPRD									
		01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	MENINGKATNYA KUALITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA SEKRETARIAT DPRD DALAM PELAYANAN MEMFASILITASI KEGIATAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD								
			2.01		Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Presentasi Laporan Kinerja Dan Laporan Keuangan yang disusun tepat Waktu	100%	0%	100%	100%	0%	100%	100%	
				06	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Tersusun Dokumen Renstra ,Renja ,Rka ,Lkj	Dokumen	0%	Dokumen	100%	0%	Dokumen	Dokumen	
			2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Presentasi Administrasi keuangan Sekretariat DPRD kabupaten Halmahera utara	100%	90%	100%	96,81%	100%	100%	100%	
				01	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sekretariat DPRD	33 Orang/bulan	100%	33Orang/bulan	96,81%	100%	33 Orang/bulan	Orang/bulan	
			2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentasi administarsi Capaian Kepegawaian Sekretariat DPRD Kab halmahera Utara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Dan Kelengkapannya Bagi sekretariat DPRD	Paket	100 %	Paket	56,82%	0%	Paket	Paket	
				09	Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan fungsi	Jumlah Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan fungsi Bagi sekretariat DPRD	Orang	99,98%	Orang	0%	37,22%	Orang	Orang	
			2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Preseantasi administrasi umum Bagi Sekretariat DPRD Kab Halamahera Utara	100%	93%	100%	100%	83%	100%	100%	
				02	Penyediaan peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Belanja Honorrarium Pengadaan Barang dan Jasa	Paket	0%	Paket	0%	0%	Paket	Paket	

						Kantor sekretariat DPRD								
				04	Penyediaan Barang logistik Kantor	Jumlah Tersedianya Makanan dan Minum Rapat bagi anggota DPRD	Paket	89,58%	Paket	100%	86,10%	Paket	Paket	
				05	Peyediaan Barang cetakan dan Pengandaan	Jumlah Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan	Paket	79,23%	Paket	83,22%	47,78%	Paket	Paket	
				06	Penyediaan bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang -undangan	Jumlah Tersedianya Bahan Bacaan dan peraturan Perundang -undangan	Dokumen	83,42%	Dokumen	67,66%	77,58%	Dokumen	Dokumen	
				08	Fasiliatsi Kunjungan Tamu	Jumlah Tersedianya Makanana dan Minum tamu	laporan	100%	laporan	99,95%	86,10%	laporan	laporan	
			2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan pemerintah	Presentasi Jumlah Pengadaan barang milik Daerah Penunjang Urusan pemeritah	100%	0%	100%	90,61%	0%	100%	100%	
				10	Pengadaan sarana Prasarana Gedung kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Pengadaan Sarana Prasarana Gedung kantor atau bangunan Kantor sekretariat DPRD	Paket	0%	Paket	90,61%	0%	Paket	Paket	
			2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentasi Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	
				01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Laporan	99,93%	Laporan	91,04%	70,07%	Laporan	Laporan	
				02	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tersedianya Jasa KomunikasinSumber Daya air dan listrik	Laporan	78,05%	Laporan	67,92%	50,81%	Laporan	Laporan	
				04	Penyediaan jasa Pelayanan Umum	Tersedianya Jasa Pelayanan umum Kantor	Laporan	99,00%	Laporan	89,77%	70,64%	Laporan	Laporan	
			2.09		Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentasi Jumlah Pemeliharaan barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				02	Penyediaan jasa Pemeliharaan,Biaya pemeliharaan Pajak Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Pimpinan DPRD Dan Sekretariat DPRD	Unit	89,12%	Unit	88,80%	64,56%	Unit	Unit	
				06	Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin	Tersedianya Biaya Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Pimpinan DPRD Dan Sekretariat DPRD	Unit	0%	Unit	88,21%	0%	Unit	Unit	
				09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Tersedianya Biaya Pemeliharaan gedung kantor dan bangunan Kantor sekretariat DPRD	Unit	100%	Unit	77,94	76,52%	Unit	Unit	
				11	Pemeliharaan /Rehabiliatsi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya	Tersedinaya Biaya Pemeliharaan /Reahabilitasi sarana dan prasarana Pendukung gedung Kantor Dan Bagunan Kantor sekretariat DPRD Lainnya	Unit	100%	Unit	85,40%	51,01%	Unit	Unit	
			2.15		layanan Keuangan Dan Kesejahtraan DPRD	Presentasi Layanan Keuangan Dan Kesejahtraan Anggota DPRD kabupaten Halmahera Utara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				02	Penyelenggaraan Pakaian Dinas Dan atribut DPRD	Tersedianya Jumlah Pakaian Dinas Dan Atribut bagi Anggota DPRD Halmahera Utara	Paket	100%	Paket	55,34%	69,34%	Paket	Paket	
				03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Tersedianya Medical Check Up bagi Anggota DPRD	25 Orang	100%	25 Orang	88,00%	100%	25 Orang	25 Orang	

			2.16		layanan Administrasi DPRD	Presentasi Layanan Administrasi Anggota DPRD Halmahera Utara	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				03	Fasilitasi Rapat Koordinasi Dan Konsultasi DPRD	Tersedianya Honorarium Petugas Penghubung Anggota DPRD Di Jakarta		100%		100%	51,72%			
				04	Penyediaan Kebutuhan Rumah tangga DPRD	Jumlah paket Kebutuhan rumah tangga DPRD yang disediakan	Paket		Paket	30,93%		Paket	Paket	
4	2	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN DALAM RANGKA MEMFASILITASI SETIAP KEGIATAN PIMPINAN Dan ANGGOTA DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			2.01		Pembentukan Peraturan Daerah Dan Peraturan DPRD	Presentasi Pembentukan Peraturan Daerah Dan Peraturan DPRD Kab.Halmahera Utara	100%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	
				01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Tersedianya Jumlah Biaya Dokumen Yang Yang Di Perdakan	Dokumen	93,33%	Dokumen	46,58%	58,92%	Dokumen	Dokumen	
				06	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan /Keterangan Naskah Akademik	Tersedianya Honorarium Penyusun Naskah Akademik	Dokumen	0%	Dokumen	100%	0%	Dokumen	Dokumen	
			2'04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Presentasi Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				02	Bimbingan Teknis DPRD	Terlaksananya Bimtek	Dokumen	0%	Dokumen	75,63%	97,17%	Dokumen	Dokumen	
				04	Penyediaan Kelompok Pakar Dan Tim Ahli	Tersedianya jasa Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Orang	0%	Orang	75,76%	37,02%	Orang	Orang	
				05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Tersedianya Jasa Tanaga Ahli Fraksi	Orang	100%	Orang	98,30%	79,59%	Orang	Orang	
			2.05		Penyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Presentasi Penyerapana Dan Penghimpunan Aspirasi masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
				01	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Terlaksananya Kunjungan Kerja Pimpinan Dan anggota DPRD	Dokumen	93,99%	Dokumen	94,84%	96%	Dokumen	Dokumen	
				03	Kegiatan Reses	Terlaksananya kegiatan Reses Dan Penyampaian Aspirasi Masyarakat	Dokumen	100%	Dokumen	83,30%	98,67%	Dokumen	Dokumen	
			2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Presentasi Fasilitasi Tugas DPRD	100%	100%	100%	88,95%	95,15%	100%	100%	
				01	Koordinasi Dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Tersedinaya Biaya Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Dokumen	100%	Dokumen	88,95%	95,15%	Dokumen	Dokumen	

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan RENJA Sekretariat DPRD dan Pencapaian RENSTRA Sekretariat DPRD Sampai Dengan Tahun 2021 Provinsi Maluku Utara

b. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD

Tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD dimana Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.

Gambaran kinerja pelayanan Sekretariat DPRD dapat diukur pencapaian keberhasilannya melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) 2016-2021 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Tahun 2016-2021. IKU Sekretariat DPRD, sebagai berikut:

1. Presentasi ranperda yang ditetapkan menjadi Perda

Berdasarkan IKU Sekretariat DPRD Kabupaten Halmahera Utara tersebut, maka pengukuran pencapaian kinerja pelayanan dapat dilihat pada table T-C 30 berikut ini:

Tabel T-c 30

No	Indikator	SPM/sta ndar nasional	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi Capaian		Proyeksi	
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2025	Tahun 2026
1	Jumlah Perda Inisiatif			5 Perda Inisiatif	6 Perda Inisiatif	3 Perda Inisiatif		5 Perda Inisiatif	6 Perda Inisiatif	3 Perda Inisiatif	
2	Jumlah Rapat- rapat Alat Kelengkapan Dewan			145 Hasil Rapat	150 Hasil Rapat	0 Hasil Rapat		145 Hasil Rapat	150 Hasil Rapat	0 Hasil Rapat	
3	Jumlah Aspirasi Masyarakat/ Konstituen			183 Aspirasi	165 Aspirasi	0 Aspirasi		165 Aspirasi	168 165	0 Aspirasi	
4	Jumlah Bimtek, Workshop, Lokakarya, Seminar, Inhous Training			3 Kegiatan	4 Kegiata n	3 Kegiatan		3 kegiatan	4 Kegiatan	2 Kegiatan	
5	Tersampaiannya Informasi Kegiatan Anggota DPRD			900 Eksemplar	900 Eksempl ar	0 Eksemplar		900 Eksempl ar	900 Eksemplar	0 Eksemplar	
6	Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD			30 Kegiatan	35 Kegiata n	40 3 Perda		30 Kegiata n	35 Kegiatan	40 Kegiatan	Kegiatan

Pencapaian Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD kabupaten
Halmahera Utara

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun 2025 dan target 2025.

1. Untuk tahun 2024 yang berasal dari insiatif DPRD 5 Perda dan yang ditetapkan 1 Perda .untuk tahun 2024 ditargetkan 3 perda namun Tidak dapat ditetapkan Perda.dan untuk tahun 2025 Belum bisa diketahui karena prolegda untuk 2025 ditetapkan akhir tahun 2024 (sebelum APBD 2024 ditetapkan)
5. Secara Umum rapat-rapat Alat kelengkapan DPRD agak sulit untuk ditargetkan pada tahun berikut .karena dinamika politik yang selalu berkembang di DPRD.oleh karena itu semua rapat alat kelengkapan dewan ,baik rapat pimpinan,rapat –rapat komisi (komisi 1,II,dan III)serta rapat –rapat paripurna dan alat kelengkapan lainnya dirangkum /dihitung pada saat laporan penutupan masa siding dibuat dalam DPA sekretariat DPRD 2024.Rapat-rapat alat kelengkapan dewan ini terakomodir dalam bentuk kegiatan penyediaan makanan dan minuman rapat
- 3,Aspirasi masyarakat / konstutuen diterima pada saat kegiatan Reses berlangsung yaitu 2 kali dalam satu tahun dan dilaksanakan dimasing –masing dapil yaitu Dapil I (tobelo dan sekitarnya) Dapil II (galela –loloda) dan Dapil III (kao –malifut) disamping itu ada juga aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat diluar dari kegiatan reses.
4. Bimbingan teknik dilakukan pada tiap tahun dalam rangka meningkatkan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi .
5. Setiap Kegiatan DPRD baik dalam bentuk rapat-rapat maupun kunjungan kerja didokumentasikan dalam bentuk risalah / laporan tersebut kemudian dituangkan dalam bulletin DPRD untuk menjadi Informasi Bagi Masyarakat tentang sejauh mana pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD kabupaten Halmahera Utara .
6. jumlah kunjungan kerja baik dalam daerah maupun luar daerah dilakukan sesuai dengan urgensi tugas dan fungsi dan disesuaikan dengan anggaran .

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Sekretariat DPRD

Peran Sekretariat DPRD adalah memberikan pelayanan dan dukungan administratif terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Untuk memberikan pelayanan dan dukungan tersebut, Sekretariat DPRD harus sering membangun koordinasi dan komunikasi secara baik dengan Anggota DPRD sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dapat berjalan optimal.Pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, baik fungsi pembentukan Perda, penganggaran dan pengawasan bergantung pada kesigapan Sekretariat DPRD dalam mendorong dan memfasilitasi peningkatan kualitas kinerja DPRD sesuai kebutuhan dan tepat waktu.Dengan pelayanan dan dukungan yang optimal pencapaian kinerja DPRD dengan 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai tolak ukur pencapaian kinerja Sekretariat DPRD dapatdicapai.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD dapat diidentifikasi permasalahan dan isu- isu strategis secara umum yang diproyeksikan kedepannya, sebagai berikut:

1. Belum adanya pelayanan terbaik, yaitu pelayanan yang serba cepat, responsif dan tepat dari

Sekretariat DPRD dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD.

2. Belum optimalnya pelayanan dari Sekretariat DPRD yang berpijak pada efisiensi dan efektivitas serta totalitas dalam memfasilitasi tugas-tugas DPRD.
3. Belum profesionalnya sumber daya aparatur Sekretariat DPRD yang tersedia dalam mendukung kegiatan DPRD.

Sedangkan isu strategis secara khusus dan bersifat operasional adalah sebagai berikut :

1. Pengadministrasian kantor yang belum tertata dengan baik.
2. Belum tersedianya Website yang dimiliki Sekretariat DPRD sebagai salah satu sarana informasi dan pelayanan terhadap masyarakat.
3. Belum optimalnya pemetaan kebutuhan pelayanan terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD yang akurat.
4. Belum berkembangnya jejaring kerjasama pengembangan pelayanan yang efektif.
5. Minimnya tenaga Perancang Undang-Undang (*legaldrafter*).
6. Belum seluruhnya SDM Sekretariat DPRD mempunyai kompetensi yang cukup dalam hal pelayanan terbaik dan optimal serta profesional.

Hal-hal tersebut berimplikasi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sekretariat DPRD sehingga secara tidak langsung mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Bupati dan wakil bupati yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021.

Sekretariat DPRD secara tidak langsung dituntut untuk terus memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya untuk mendukung pelaksanaan tugas DPRD. Untuk itu, terdapat beberapa tantangan bagi Sekretariat DPRD dalam memberikan dukungan dan pelayanan terhadap kinerja Anggota DPRD, diantaranya:

1. Intervensi Anggota DPRD terhadap Sekretariat DPRD yang berlebihan.
2. Dinamika politik yang tinggi mempengaruhi kinerja DPRD maupun Sekretariat DPRD.
3. Perubahan peraturan perundang-undangan pada tingkat pusat yang mempengaruhi kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD.
4. Latar belakang dan karakter Anggota DPRD yang berbeda-beda (heterogen) membutuhkan pelayanan yang optimal.
5. Tuntutan masyarakat yang menyampaikan aspirasi dan hasil penjangkaran aspirasi kegiatan reses serta tindak lanjutnya.
6. Komposisi personil Aparatur Sipil Negara Sekretariat DPRD yang banyak harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas kerja.
7. Masih minimnya kompetensi sumber daya aparatur Sekretariat DPRD yang mumpuni dan handal secara kualitas.
8. Meningkatnya daya kritis masyarakat terhadap kinerja DPRD maupun Sekretariat DPRD.
9. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat mempengaruhi kinerja DPRD dan Sekretariat DPRD.

10. Hubungan emosional dan kekerabatan antar Anggota DPRD dan oknum Aparatur Sipil Negara Sekretariat DPRD.

Sedangkan peluang yang dimiliki Sekretariat DPRD dalam pengembangan pelayanan kepada Anggota DPRD adalah sebagai berikut:

1. Ketersedian anggaran dan sarana prasarana yang cukup memadai dalam memberikan dukungan dan pelayanan kepada Anggota DPRD.
2. Hubungan yang harmonis antara Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD mempermudah koordinasi untuk peningkatan kinerja DPRD maupun Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing.
3. Masih ada peluang peningkatan sumber daya aparatur Sekretariat DPRD untuk mengikuti lajunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam menyusun dokumen Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Tahun 2023 mengacu pada dokumen rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2024. Pada pelaksanaannya dilakukan review terkait kesesuaian dan keselarasan program dan kegiatan serta pendanaan indikatif pada dokumen RKPD dengan RENJA. Review RENJA Sekretariat DPRD terhadap RKPD Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel T-C 31 berikut ini:

RIVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2024																	
No	Tujuan	Kode					Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					
							Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Pagu	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target	Kebu tuha n	Catata n Penting
										Capaian	(Rp.)				Capaian		
1	2							3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Meningkatkan Fungsi DPRD dalam membentuk peraturan Daerah								Persentasi Perda yang diselesaikan								
1.		4	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Setwan	Tingkat capaian kinerja perangkat daerah (persen)	0		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Setwan	Tingkat capaian kinerja perangkat daerah (persen)	0		
		4	2	1	2.01		Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Setwan	Cukupan Tingkat konsistensi perencanaan perangkat daerah (persen)	##		Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Setwan	Cukupan Tingkat konsistensi perencanaan perangkat daerah (persen)	90%		
1		0	0	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Setwan	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat Daerah	##	0	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Setwan	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat Daerah	95%	0	0
0		0	0	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Setwan	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil kooordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Dokumen	0	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Setwan	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil kooordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	Dokumen	0	0
0		0	0	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Setwan	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA_SKPD	Dokumen		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Setwan	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA_SKPD	Dokumen		0

0		0	0	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Setwan	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	0	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Setwan	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	0	0
0		0	0	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Setwan	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasilkoordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Dokumen	6E+08	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Setwan	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasilkoordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Dokumen		0
0		4	2	01	2.01	06	Koordinasi Dan Penyususnan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Setwan	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan capaian hasil kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen	0	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Setwan	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan capaian hasil kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Dokumen	0	0
0		0	0	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	7 laporan	0	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	7 laporan	0	0
0		4	2	1	2.02	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.	Cukupan Tingkat realisasi pelaksanaan anggaran perangkat daerah (persen)	Laporan		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab.	Cukupan Tingkat realisasi pelaksanaan anggaran perangkat daerah (persen)	Laporan		0
0		4	2	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Halut	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	##	0	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Halut	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	1	0	0
0		4	2	1	2.05	0	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Setwan	Cakupan administrasi Kepegawaian perangkat daerah (persen)	Orang/Bulan	0	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Setwan	Cakupan administrasi Kepegawaian perangkat daerah (persen)	Orang/Bulan	0	0
0		4	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut Kelengkapan		Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	##	0	Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut Kelengkapan	0	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	1	0	0
0		4	2	1	2.05	09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan	jakarta	jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi mengikuti	Paket	7E+08	Pendidikan dan pelatihan pelatihan pegawai	jakarta	jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Paket	####	0

							Fungsi		pendidikan dan pelatihan			berdasarkan Tugas dan Fungsi		mengikuti pendidikan dan pelatihan			
0		4	2	1	2.05	#	Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang undamgan	jakarta	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	0	Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang undamgan	jakarta	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Orang	0	0
0		4	2	1	2.06	0	Adminstrasi umum perangkat daerah	0	Cakupan Administrasi umum perangkat Daerah (persen)	Orang	0	Adminstrasi umum perangkat daerah	0	Cakupan Administrasi umum perangkat Daerah (persen)	Orang	0	0
		4	2	1	2.06	0 2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Setwan	jumlah paket peralatan dan perlebgkapan kantor yang disediakan	##		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Setwan	jumlah paket peralatan dan perlebgkapan kantor yang disediakan	1		
		4	2	1	2.06	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Setwan	Jumlah paketbahan logistik kantor yang disediakan	Paket		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Setwan	Jumlah paketbahan logistik kantor yang disediakan	Paket		
		4	2	1	2.06	0 5	Penyediaan Barang cetakan dan pengadaan	Setwan	Jumlah Paket barang cetakan danpenggadaan yang disediakan	Paket		Penyediaan Barang cetakan dan pengadaan	Setwan	Jumlah Paket barang cetakan danpenggadaan yang disediakan	Paket		
		4	2	1	2.06	0 6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Setwan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	Paket		Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Setwan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	Paket		
		4	2	1	2.06	0 8	Fasilitasi kunjungan Tamu	Setwan	Jumlah laporan kunjungan Tamu	Dokumen		Fasilitasi kunjungan Tamu	Setwan	Jumlah laporan kunjungan Tamu	Dokume n		
		4	2	1	2.07	0	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Setwa n	Cukupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (persen)	4 Laporan		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Setwan	Cukupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (persen)	4 Laporan		
		4	2	1	2.07	0 1	Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Setwan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	##		Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Setwan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	1		

		4	2	1	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Setwan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Setwan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Unit		
		4	2	1	2.07	09	Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Setwan	Jumlah unit gedung kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	unit		Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Setwan	Jumlah unit gedung kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	unit		
		4	2	1	2.07	#	Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Linnya	Setwan	Jumlah Unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit		Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Linnya	Setwan	Jumlah Unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	unit		
		4	2	1	2.07	#	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Setwan	Jumlah Unit sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit		Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Setwan	Jumlah Unit sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	unit		
		4	2	1	2.08	0	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Setwan	Cukupan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	unit		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Setwan	Cukupan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	unit		
		4	2	1	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Setwan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	##		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Setwan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1		
		4	2	1	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Setwan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang disediakan	Laporan		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Setwan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang disediakan	Laporan		
		4	2	1	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Setwan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Setwan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan		
		4	2	1	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Setwan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Setwan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan		

		4	2	1	2.09	0	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Setwan	Cukupan pemeliharaan barang milik daerahpenunjang urusan pemerintahan daerah	Laporan		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Setwan	Cukupan pemeliharaan barang milik daerahpenunjang urusan pemerintahan daerah	Laporan		
		4	2	1	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Setwan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	##		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Setwan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1		
		4	2	1	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Setwan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Setwan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		
		4	2	1	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Setwan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit		Pemeliharaan Mebel	Setwan	Jumlah Mebel yang Dipelihara	unit		
		4	2	1	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Setwan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Setwan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit		
		4	2	1	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Setwan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Setwan	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit		
		4	2	1	2.09	10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Setwan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit		Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Setwan	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit		
		4	2	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Setwan	Jumlah Sarana dan Prasana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Setwan	Jumlah Sarana dan Prasana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit		
		4	2	1	2	0	Layanan Keuangan dan	Setwa	Cukupan Layanan	unit		Layanan Keuangan	Setwan	Cukupan Layanan	unit		

							kesejatraan DPRD	n	keuangan dan kesejatraan DPRD				dan kesejatraan DPRD		keuangan dan kesejatraan DPRD			
		4	2	1	2	0 1	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Setwan	Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	##			Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Setwan	Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	1		
		4	2	1	2	0 2	Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD	Setwan	Jumlah paket pakian dinas dan atribut DPRD	25 Orang/Bulan			Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD	Setwan	Jumlah paket pakian dinas dan atribut DPRD	25 Orang/Bulan		
		4	2	1	2	0 3	pelaksanaan medicasl check up DPRD	jakarta	Jumlah orang yang mengikuti medical check up DPRD	100 Paket			pelaksanaan medicasl check up DPRD	jakarta	Jumlah orang yang mengikuti medical check up DPRD	100 Paket		
		4	2	1	2.16	0	Layanan Administrasi DPRD	Setwan	Cukupan layanan administrasi DPRD	25 orang			Layanan Administrasi DPRD	Setwan	Cukupan layanan administrasi DPRD	25 orang		
		4	2	1	2.16	0 3	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	jakarta	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi	##			Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	jakarta	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi	0		
		4	2	1	2.16	0 4	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Setwan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Laporan			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Setwan	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Laporan		
		4	2	0 2	2.01	0	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Setwan	Presentasi terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Paket			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Setwan	Presentasi terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Paket		
		4	2	0 2	2.01	0	Pembentukan Peraturan Daerah Dan Peraturan DPRD	Setwan	Cukupan pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD	##			Pembentukan Peraturan Daerah Dan Peraturan DPRD	Setwan	Cukupan pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD	1		
		4	2	0 2	2.01	1	Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	Setwan	Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahsan program pembentukan peraturan daerah	##			Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	Setwan	Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahsan program pembentukan peraturan daerah	1		
		4	2	0 2	2.01	0 2	Pembahasan Rancangan Perda	Setwan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	5 Dokumen			Pembahasan Rancangan Perda	Setwan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	5 Dokumen		
		4	2	0 2	2.01	0 4	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Katerangan Naskah Akademik	Setwan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang	Dokumen			Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Katerangan Naskah Akademik	Setwan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah	Dokumen		

									Difasilitasi					Akademik yang Difasilitasi			
		4	2	0 2	2.02	0	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Setwan	Cukupan Tingkat pembahasan kebijakan anggaran	Dokumen		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Setwan	Cukupan Tingkat pembahasan kebijakan anggaran	Dokumen		
		4	2	0 2	2.02	0 1	Pembahasan KUA dan PPAS	Setwan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	##		Pembahasan KUA dan PPAS	Setwan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1		
		4	2	0 2	2.02	0 2	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Setwan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen		Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Setwan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Dokumen		
		4	2	0 2	2.02	0 3	Pembahasan APBD	Setwan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen		Pembahasan APBD	Setwan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Dokumen		
		4	2	0 2	2.02	0 4	Pembahasan APBD Perubahan	Setwan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen		Pembahasan APBD Perubahan	Setwan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Dokumen		
		4	2	0 2	2.04	0	Peningkatan Kapasitas DPRD	jakarta	Cukupan Ketersediaan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD	Dokumen		Peningkatan Kapasitas DPRD	jakarta	Cukupan Ketersediaan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD	Dokumen		
		4	2	0 2	2.04	0 2	Pendalaman Tugas DPRD	jakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	##		Pendalaman Tugas DPRD	jakarta	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	0.9		
		4	2	0 2	2.04	0 4	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Setwan	Jumlah Orang Dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Dokumen		Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Setwan	Jumlah Orang Dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Dokumen		
		4	2	0 2	2.04	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Setwan	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang		Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Setwan	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Orang		
		4	2	0 2	2.05	0	Penyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3 dapil	Cukupan Terpenuhinya Penyerapan dan penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang disampaikan Kepada Anggota DPRD	Orang		Penyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	3 dapil	Cukupan Terpenuhinya Penyerapan dan penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang disampaikan Kepada Anggota DPRD	Orang		
		4	2	0 2	2.05	0 1	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Tobelo	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	##		Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Tobelo	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	0.9		
		4	2	0 2	2.05	0 3	Pelaksanaan Reses	3 dapil	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	Laporan		Pelaksanaan Reses	3 dapil	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan	Laporan		

[illegible]

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Merujuk pada ketentuan pasal Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa Sekretariat DPRD kabupaten Halmahera Utara di pimpin oleh Sekretaris DPRD, yang dalam pelaksanaan tugasnya secara teknis operasional bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dengan demikian Sekretariat DPRD memiliki peran untuk memberikan pelayanan dan dukungan administrasi secara optimal dan akuntabel dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil verifikasi, validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Sekretariat DPRD masuk dalam kategori urusan unsur pendukung pemerintahan yang memberikan pelayanan langsung kepada Anggota DPRD dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Terkait dengan tugas dan fungsi tersebut, maka tidak dilakukan penelaahan usulan program dan kegiatan yang disampaikan oleh masyarakat atau para pemangku kepentingan. Namun, terdapat usulan-usulan masyarakat yang disampaikan masyarakat pada kegiatan reses DPRD yang menjadi pokok-pokok pikiran DPRD sebagai usulan perencanaan pembangunan daerah. Pokok-pokok pikiran DPRD tersebut secara langsung berhubungan dengan Perangkat Daerah teknis sehingga tidak masuk dalam program dan kegiatan yang melekat pada Sekretariat DPRD.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa Sekretariat DPRD tidak mengakomodir program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat atau pemangku kepentingan. Tetapi, Sekretariat DPRD memfasilitasi usulan yang disampaikan tersebut kepada Anggota DPRD pada saat kunjungan kerja atau kegiatan reses dalam rangka menyerap dan menampung aspirasi Masyarakat.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN SEKRETARIAT DPRD

A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, telah ditetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten Halmahera Utara Tahun 2016-2021 yang dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Kebijakan Pembangunan Nasional.

Dari hasil telaahan Kebijakan Nasional terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Utara mengenai strategi dan arah kebijakan pencapaian tujuan dan sasaran masing-masing misi terkait dengan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD adalah:

i. Tugas

Sekretaris DPRD mempunyai tugas secara teknis dan operasional berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

ii. Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud, Sekretaris DPRD mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. Fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD

Rumusan Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD . Tujuan dan sasaran dituangkan dalam tabel berikut:

[illegible]

3.1 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2024 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Namun dalam perjalanan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Tahun 2016-2021, telah diterbitkan regulasi baru sehingga perlu dilakukan penyesuaian kembali antara program, kegiatan, dan sub kegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- a. Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, sub kegiatannya terdiri dari:
 - Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah;
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD;
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD;
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD;
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD; dan
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, sub kegiatannya terdiri dari:
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas AS
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, sub kegiatannya terdiri dari:
 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai;
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya;
 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi; dan
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan.

- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, sub kegiatannya terdiri dari:
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - Fasilitas Kunjungan Tamu;
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sub kegiatannya terdiri dari
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya; dan
 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sub kegiatannya terdiri dari:
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor; dan
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, sub kegiatannya terdiri dari:
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya; dan
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.
- h. Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD, sub kegiatannya terdiri dari:
- Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD;
 - Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD; dan
 - Pelaksanaan *Medical Check Up* DPRD.
- i. Kegiatan Layanan Administrasi DPRD, sub kegiatannya terdiri dari:
- Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD; dan

2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

- a. Kegiatan Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD, sub kegiatannya terdiri dari:
 - Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah;
 - Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik
- b. Peningkatan Kapasitas DPRD, sub kegiatannya terdiri dari:
 - Orientasi DPRD;
 - Pendalaman Tugas DPRD;
 - Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli;
 - Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi;
 - Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat; dan
- c. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat, sub kegiatannya terdiri dari:
 - Kunjungan Kerja dalam Daerah;
 - Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD; dan
 - Pelaksanaan Reses.
- d. Kegiatan Fasilitasi Tugas DPRD, sub kegiatannya terdiri dari:
 - Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD;
 - Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah; dan
 - Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD.

Rumusan Rencana Program Dan kegiatan Sekretariat DPRD Halut Tahun 2023
Dan Perkiraan maju Tahun 2024

Kode					Urusan /Bidang Pemerintahan Daerah Dan program /Kegiatan	Indikator Kinerja Program Kegiatan		Rencana Tahun 2023			Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024	
								Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana Pagu Indikatif		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2		3	4	5	6	7	8	9
4	2	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat capaian kinerja perangkat daerah (persen)		Setwan	77 ,31 %	29.048.431.399		90%	24.677.984.851
4	2	1	2.01		Perencanaan Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Cukupan Tingkat konsistensi perencanaan perangkat daerah (persen)		Setwan	0 %	0		100%	40.021.800
4	2	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan perangkat Daerah		Setwan	2 Dok	0		2 Dok	5.717.400
4	2	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil kooordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD		Setwan	1 Dok	-		1 Dok	5.717.400
4	2	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA_SKPD		Setwan	1 Dok	-		1 Dok	5.717.400
4	2	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen Perubahan DPA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen Perubahan DPA-SKPD		Setwan	1 Dok	-		1 Dok	5.717.400

4	2	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen DPA-SKPD dan laporan hasilkoordinasi penyusunan dokumen DPA-SKPD	Setwan	Dokumen	-		Dokumen	5.717.400
4	2	01	2.01	06	Koordinasi Dan Penyususnan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan capaian hasil kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Setwan	7 laporan	-		7 laporan	5.717.400
4	2	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	0	0%	-		0%	5.717.400
4	2	1	2.02	0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cukupan Tingkat realisasi pelaksanaan anggaran perangkat daerah (persen)	Kab.	100%	2.212.223.545		100%	3.949.523.792
4	2	1	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Halut	12 bln	2.212.223.545		12 bln	3.949.523.792
4	2	1	2.05		Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan administrasi Kepegawaian perangkat daerah (persen)	Setwan	61,95 %	77.227.400		100%	265.402.600
4	2	1	2.05	2	Pengadaan Pakaian dinas beserta atribut Kelengkapan	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	0	Paket	77.227.400,00		Paket	75.078.600
4	2	1	2.05	09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi mengikuti pendidikan dan pelatihan	jakarta	Orang	0		Orang	0
4	2	1	2.05	11	Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang undamgan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	jakarta	Orang	0		Orang	190.324.000
4	2	1	2.06		Adminstrasi umum perangkat daerah	Cakupan Administrasi umum perangkat Daerah (persen)	0	100%	2.401.115.500		100%	2.378.913.700
4	2	1	2.06	02	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Setwan	0 %	0		Paket	0

4	2	1	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paketbahan logistik kantor yang disediakan	Setwan	Paket	1.400.050.000		12 Paket	1.123.100.000
4	2	1	2.06	05	Penyediaan Barang cetakan dan pengadaan	Jumlah Paket barang cetakan danpengadaan yang disediakan	Setwan	Paket	248.333.000		2 Paket	350.015.700
4	2	1	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang undangan yang disediakan	Setwan	Dokumen	116.000.000		Dokumen	199.950.000
4	2	1	2.06	08	Fasilitasi kunjungan Tamu	Jumlah laporan kunjungan Tamu	Setwan	4 Laporan	636.732.500		3 Laporan	705.848.000
4	2	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cukupan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah (persen)	Setwan	12 bln	4.435.660.300		12 bln	2.455.389.000
4	2	1	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Dinas Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang disediakan	Setwan	Unit	52.000.000,00		Unit	0
4	2	1	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang disediakan	Setwan	Unit	0		Unit	0
4	2	1	2.07	09	Pengadaan Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau Bangunan lainnya yang disediakan	Setwan	Unit	0		unit	0
4	2	1	2.07	10	Pengadaan Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Linnya	Jumlah Unit sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Setwan	Unit	4.383.660.300,00		4 unit	2.455.389.000
4	2	1	2.07	11	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit sarana dan prasarana pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Setwan	Unit	0		unit	0
4	2	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cukupan Penyenyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Setwan	0%	1.537.911.059		0%	1.812.245.517
4	2	1	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Setwan	Laporan	308.932.800		Laporan	410.670.400

4	2	1	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang disediakan	Setwan	Laporan	235.829.397		12 Laporan	367.325.417
4	2	1	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Setwan	Laporan	0		Laporan	0
4	2	1	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Setwan	Laporan	993.148.862		12 Laporan	1.034.249.700
4	2	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cukupan pemeliharaan barang milik daerahpenunjang urusan pemerintahan daerah	Setwan	0%	403.623.000		0%	750.193.500
4	2	1	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Setwan	Unit	0		Unit	0
4	2	1	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Setwan	Unit	106.700.000		2 unit	199.140.000
4	2	1	2.09	05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	Setwan	Unit	0		unit	0
4	2	1	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Setwan	Unit	187.973.000		2 unit	401.053.500
4	2	1	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Setwan	Unit	108.950.000		2 unit	150.000.000
4	2	1	2.09	10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	Setwan	unit	0		unit	0

					atau Bangunan Lainnya	Dipelihara/Direhabilitasi						
4	2	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Setwan	0%	0		0%	0
4	2	1	2.2		Layanan Keuangan dan kesejahteraan DPRD	Cukupan Layanan keuangan dan kesejahteraan DPRD	Setwan	0%	14.852.688.745		0%	13.026.145.042
4	2	1	2.2	01	Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD	Jumlah anggota DPRD yang menerima hak keuangan DPRD	Setwan	25 Orang/Bulan	14.852.688.745		25 Orang/Bulan	12.557.084.642
4	2	1	2.2	02	Penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD	Jumlah paket pakian dinas dan atribut DPRD	Setwan	100 Paket	0		100 Paket	229.060.400
4	2	1	2.2	03	pelaksanaan medical check up DPRD	Jumlah orang yang mengikuti medical check up DPRD	jakarta	25 orang	0		25 orang	240.000.000
4	2	1	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Cukupan layanan administrasi DPRD	Setwan	0%	3.127.981.850		100 %	2.564.873.600
4	2	1	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi	jakarta	Laporan	35.480.000		Laporan	92.180.000
4	2	1	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	Setwan	8 Paket	3.092.501.850		12 Paket	2.472.693.600
4	2	02	2.01		PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Presentasi terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Setwan	100%	17.201.751.539		0%	5.968.288.500
4	2	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah Dan Peraturan DPRD	Cukupan pembentukan peraturan daerah dan peraturan DPRD	Setwan	0%	150.000.000		0%	774.950.000
4	2	02	2.01	1	Penyusunan dan pembahasan program pembentukan peraturan daerah	Jumlah dokumen hasil penyusunan dan pembahsan program pembentukan peraturan daerah	Setwan	5 Dokumen	0		5 Dokumen	750,000,000

4	2	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Setwan	Dokumen	0		Dokumen	0
4	2	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	Setwan	33%	150.000.000		Dokumen	24.950.000
4	2	02	2.02	0	Pembahasan Kebijakan Anggaran	Cukupan Tingkat pembahasan kebijakan anggaran	Setwan	0%	0		0%	0
4	2	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	Setwan	0%	0		0%	0
4	2	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Setwan	0%	0		0%	0
4	2	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	Setwan	0%	0		0%	0
4	2	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan	Setwan	0%	0		0%	0
4	2	02	2.04	0	Peningkatan Kapasitas DPRD	Cukupan Ketersediaan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas DPRD	jakarta	0%	682.782.000		0%	2.186.970.000
4	2	02	2.04	02	Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	jakarta	0%	475.782.000		0%	1.477.770.000
4	2	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang Dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Setwan	3 Ok	165.000.000		3 Ok	296.200.000
4	2	02	2.04	5	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	Setwan	168 OB	42.000.000		168 OB	413.000.000
4	2	02	2..05	0	Penyerapan Dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Cukupan Terpenuhinya Penyerapan dan penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang disampaikan Kepada Anggota DPRD	3 dapil	0%	4.244.210.000		0%	3.006.368.500
4	2	02	2.05	01	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	Tobelo	Laporan	0		Laporan	65.800.000

4	2	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 dapil	3 Dokumen	4.244.210.000		3 Dokumen	2.940.568.500
4	2	02	2.08	0	Fasilitasi Tugas DPRD	Presentasi Fasilitasi Tugas DPRD	jakarta	0%	12.124.759.539		0%	5.019.970.000
4	2	02	2.08	01	Koordinasi Dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	jakarta	Dokumen	12.124.759.539		Dokumen	5.019.970.000
4	2	02	2.08	02	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	jakarta	12 Bln	0		12 Bln	0
					Jumlah Belanja				46.366.182.938		0%	30.646.273.351

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SEKRETARIAT DPRD

Rencana kerja dan pendanaan Sekretariat DPRD Tahun 2024 mencakup program, kegiatan, dan sub kegiatan serta estimasi penganggaran dalam kurun waktu 1 tahun. Program, kegiatan, dan sub kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2024, dapat dilihat pada tabel T-C 3.3 berikut ini :

No	Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program	Target	Pagu Anggaran Thn 2024	Prioritas
1	2	3	4	5	6
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan daerah Kabupaten /Ko	Meningkatnya kualitas Dan Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Dalam pelayanan memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan & Anggota DPRD	100%	29.126.959.394	
2	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD	Meningkatnya kualitas pelayanan dlm rangka memfasilitasi setiap kegiatan Pimpinan & Anggota DPRD	100%	12.680.489.056	

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Tahun 2024 merupakan pedoman dan acuan pelaksanaan program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 tahun. RENJA Sekretariat DPRD ini, nomenklatur program dan kegiatannya berbeda dengan program dan kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya karena sudah disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dengan adanya RENJA ini diharapkan ada keselarasan dan kesesuaian program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam pelaksanaannya pada setiap unit organisasi pada Sekretariat DPRD pada tahun 2024 sehingga pelayanan dan dukungan secara administrasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota DPRD dapat berjalan dengan lancar dan optimal.

Demikian RENJA ini disusun untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing unit pada Sekretariat DPRD kabupaten Halmahera Utara.

Tobelo, 07 Maret 2024



EKA PUTRA, S.STP

NIP. 198301052001121003